

Suatu akad yang menghalalkan hubungan seksual antara suami dan isteri, dan yang menimbulkan hubungan hak dan kewajiban antara keduanya yang mempunyai karakteristik khusus yaitu :

1. Perkawinan tidak dapat dilakukan tanpa persetujuan kedua belah pihak.
2. Kedua belah pihak saling mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian tersebut berdasarkan ketentuan yang sudah ada; dan
3. Persetujuan perkawinan itu mengatur batas-batas hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Sedangkan perkawinan jika dilihat dari sisi sosial, maka pernikahan memiliki arti yang sangat penting, yaitu :

1. Orang yang melakukan atau pernah melakukan perkawinan mempunyai kedudukan yang lebih dihargai daripada mereka yang belum kawin.
2. Menempatkan kaum wanita pada posisi yang terhormat, misalnya sebelum ada peraturan perkawinan, wanita dulu bisa dimadu tanpa batas dan tanpa bisa berbuat banyak, tetapi menurut ajaran Islam poligami hanya dibatasi paling banyak empat orang.

Perkawinan, menurut hukum Islam, bukan semata-mata untuk rekreasi, untuk bersenang-senang, tempat melampiaskan hawa nafsu, yang lepas dari nilai-nilai dan ketentuan-ketentuan *dinul Islam*. Oleh karena itu, perkawinan mut'ah dikalangan sunni adalah dilarang dilakukan. Perkawinan dalam Islam merupakan lembaga mulia, lembaga suci, lembaga penerus generasi dan penentu keberhasilan setiap anggota keluarga, lembaga penunjang kemaslahatan masyarakat sekitarnya, bahkan kemaslahatan bangsa dan negara.

umum pada angka 4 huruf b Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, seperti kutipan langsung berikut.

“Dalam Undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa –peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat –surat keterangan, suatu akta yang juga dimuat dalam daftar pencatatan”.

Mengingat perkawinan di Indonesia harus melalui pencatatan perkawinan, maka dalam prakteknya pernikahan harus dilakukan dibawah tugas dan wewenang KUA atau dengan Pegawai Pencatat Nikah(PPN). Sebelum perkawinan yang didalamnya terdapat akad yaitu ijab qabul, maka perlu adanya pendaftaran perkawinan di Kantor Urusan Agama yang sudah disediakan sesuai kediaman pihak mempelai putra dan putri.

Pasangan suami istri yang akan menikah harus mendaftarkan pernikahan di KUA yang ada di setiap kecamatan. Pada umumnya calon suami istri akan membawa semua berkas persyaratan pernikahan ke kantor urusan agama di kecamatan kediaman calon istri. Tetapi, tidak sedikit pasangan yang melangsungkan pernikahannya di tempat atau kantor urusan agama yang berbeda dengan kediaman calon suami maupun istri. pernikahan ini tetap diakui oleh negara dengan catatan persyaratan yang sudah ditentukan sudah terpenuhi sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Setelah melakukan prosedur pendaftaran, melalui pegawai KUA akan diperiksa kelengkapan berkas-berkas yang sudah di bawa oleh calon suami dan

istri. Setelah berkas terpenuhi maka dilakukan rafaq lalu diadakannya akad nikah. Dengan adanya akad nikah pasangan suami istri telah menyatukan hatinya dalam ikatan yang suci dan diridhoi oleh Allah serta diakui juga oleh negara. Dengan adanya bukti yaitu salinan akta nikah yang dikeluarkan oleh KUA setempat dimana suami istri itu melangsungkan perkawinannya.

Perkembangan ilmu pengetahuan saat ini sangatlah pesat, terutama di bidang teknologi. Terdapat kasus seorang Janda kaya beranak 2 dari perkawinannya terdahulu melakukan pernikahan dengan Anggota Militer yang masih perjaka. Janda dan Anggota Militer ini melakukan pernikahan di Masjid yang berlokasi di Malang. Janda ini sudah mempunyai wali nasab namun walinya enggan untuk menikahnya, sehingga harus menggunakan wali hakim. Mereka dinikahkan oleh seorang ustadz yang sengaja disewa oleh anggota militer untuk melancarkan pernikahannya dengan janda. Ustadz mengaku sebagai pegawai KUA. Dalam pernikahan ini hanya dihadiri 2 orang saksi dan ustadz yang mengaku sebagai pegawai KUA.

Setelah Akad Nikah berlangsung pasangan Janda dan Anggota Militer tadi Mendapatkan Akta Nikah yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo. Terdapat keganjalan akta nikah yang dimiliki oleh pasangan janda dan anggota militer ini. Pernikahan yang terjadi di Malang namun akta nikah tersebut diterbitkan di KUA Taman Kabupaten Sidoarjo.

Lambat Laun Janda ini meninggal, ke dua anak janda yang dibawa dari perkawinannya terdahulu menuntut hak waris yang seharusnya didapat dari ibu kandungnya, yang mana hak waris tersebut dikuasai sepenuhnya oleh Anggota

Militer (Ayah tirinya). Karena anak-anak janda ini mengetahui adanya keganjalan dari Akta Nikah yang dimiliki oleh Janda dan Anggota Militer ini, anak-anak mengadakan peristiwa ini kepada saudara ibunya. Hingga mereka memutuskan untuk mendatangi KUA Taman Kabupaten Sidoarjo. Setelah kedatangan mereka Kepala KUA Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo dipanggil oleh Pengadilan Militer Surabaya untuk mengonfirmasi Akta Nikah tersebut. Ternyata pasangan Janda dan Anggota Militer ini tidak pernah mendaftarkan pernikahannya di KUA Kecamatan Taman. Salinan berkas akta nikah di KUA Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo juga tidak ada yang sama. Dari sinilah diketahui bahwa Akta Nikah yang dimiliki mereka adalah palsu atau sengaja di manipulasi.

Jadi, problematika manipulasi kutipan akta nikah sampai saat ini masih belum ada tanggapan dengan jelas. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap status perkawinan suami istri tersebut, karena perkawinan ini telah dilakukan sah menurut hukum agama namun tidak sah menurut hukum positif yang nantinya keabsahan perkawinannya akan berdampak terhadap anaknya. Oleh sebab itu, penelitian ini dikhususkan “Studi Komparasi Antara Hukum Positif dan Hukum Islam Tentang Manipulasi Akta Nikah Dalam Perkawinan (Studi Kasus KUA Kec. Taman Kab. Sidoarjo)”

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari pemaparan latar belakang diatas, dapat diketahui bahwa permasalahan pokok yang akan dikaji adalah mengenai masalah manipulasi akta

Tujuan Perkawinan menurut hukum islam dan hukum positif, kedudukan wali dalam perkawinan menurut hukum isam dan hukum positif, pembatasan perkawinan menurut hukum islam dan hukum positif, pencatatan perkawinan, tata laksana pencatatan perkawinan.

Bab ketiga berisikan data penelitian yaitu tentang manipulasi akta nikah di KUA Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo yang meliputi: gambaran KUA kec. Taman Kab. Sidoarjo secara umum, Sejarah berdirinya dan letak geografis, jumlah kepadatan penduduk dan pemeluk agama ,Visi dan Misi, Tugas, Fugsi dan kebijaksanaan KUA, dasar hukum pencatatan di KUA, kemudian kronologi manipulasi akta nikah dalam perkawinan. Dampak adanya manipulasi akta nikah.

Bab keempat berisi komparasi terhadap temuan studi penelitian Adapun cakupan dalam bab ini adalah terdiri dari tinjauan hukum islam tentang manipulasi akta nikah dalam perkawinan dan tinjauan hukum positif tentang hak manipulasi akta nikah dalam perkawinan, persamaan dan perbedaan hukum islam dan hukum positif tentang manipulasi akta nikah dalam perkawinan di KUA Kec. Taman Kab Sidoarjo

Bab kelima merupakan bab terakhir berisi mengenai kesimpulan-kesimpulan dan jawaban singkat dari rumusan masalah dan saran-saran yang sesuai dan bermanfaat bagi penelitian berikutnya pada khususnya maupun bagi masyarakat pada umumnya.